



**KONFLIK PENGGUNAAN CANTRANG MASYARAKAT NELAYAN DI  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 1996-2015**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memeroleh Gelar  
Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

**Disusun oleh:  
Icha Mursyidah  
NIM 13030114130053**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2018**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya, Icha Mursyidah, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 11 Oktober 2018  
Penulis,

Icha Mursyidah  
NIM 13030114130053

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun”.

Ir. Soekarno

“Permudahlah urusan orang lain maka Allah akan mempermudah urusanmu”

Penulis

Dipersembahkan untuk:  
Kedua orang tua,  
adik, sahabat dan teman-teman  
Jurusan Ilmu Sejarah  
FIB UNDIP

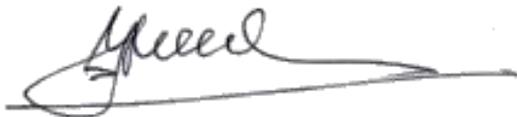
**Disetujui,  
Dosen Pembimbing,**



**Prof. Dr. Sutejo K. Widodo, M.Si.  
NIP. 196005151985031004**

Skripsi dengan judul "Konflik Penggunaan Cantrang Masyarakat Nelayan di Kabupaten Rembang Tahun 1996-2015" yang disusun oleh Icha Mursyidah (NIM 13030114130053) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Studi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Kamis, 11 Oktober 2018.

Ketua,



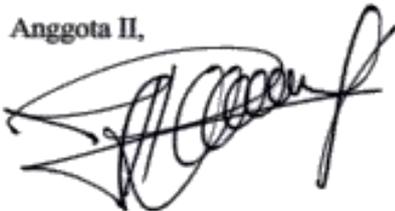
Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si.  
NIP.196106051986032001

Anggota I,



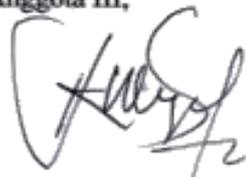
Prof. Dr. Sutejo K. Widodo, M.Si.  
NIP. 196005151985031004

Anggota II,



Dr. Haryono Rinardi, M.Hum.  
NIP. 196703111993031004

Anggota III,



Dra. Titiek Suliyati, M.T.  
NIP. 195612101987032001



Mengesahkan,  
Dekan

Dr. Redyanto Noor, M. Hum.  
NIP. 195903071986031002

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konflik Penggunaan Cantrang Masyarakat Nelayan di Kabupaten Rembang Tahun 1996-2015”. Selain didasarkan pada pentingnya penulisan mengenai sejarah konflik penggunaan alat tangkap, pemilihan tema ini juga dilakukan karena penulis menaruh minat terhadap kajian sosial masyarakat maritim. Kajian tersebut berperan besar terhadap aspek pembangunan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang khususnya Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak permasalahan di bidang maritim yang belum terselesaikan dan perlu mendapatkan perhatian yang besar guna mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lebih lanjut, skripsi ini disusun untuk menempuh ujian akhir Program Studi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dan petunjuk, baik berupa material maupun spiritual kepada yang terhormat: Dr. Redyanto Noor, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respati Puguh, M.Hum., selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang berkenan memberikan izin dan kemudahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Sutejo K. Widodo, M.Si., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bekal keilmuan, pengarahan, dan bimbingan selama penulis menyusun skripsi ini. Terima kasih juga kepada Dr. Agustinus Supriyono, M.A., selaku dosen wali yang dengan sabar telah memberikan perhatian terhadap perkembangan akademik penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada segenap dosen penguji: Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si., Dr. Haryono Rinardi, M.Hum., Dra. Titiek Suliyati, M.T., yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun bagi perbaikan skripsi ini.

Terima kasih penulis haturkan kepada segenap pengajar Program Studi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan, terima kasih juga penulis haturkan untuk segenap staf administrasi Program Studi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan yang maksimal. Terakhir penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap staf/pegawai Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang sudah banyak membantu penulis dalam mencari, menemukan dan memberikan data maupun sumber untuk penulisan skripsi.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua yang hebat, Muhardi dan Martiah, adik penulis Sania Amrina Rosyada yang telah memberikan bantuan moral maupun spiritual sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para sahabat di Program Studi Sejarah yang sangat luar biasa memberikan dukungan dan bantuan selama berada di lingkungan Program Studi Sejarah.

Skripsi ini pada hakikatnya masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan baik dalam hal tata tulis maupun substansi, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Oleh karena itu, meskipun skripsi ini jauh dari kesempurnaan, semoga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 11 Oktober 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	ii	
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b>	iii	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	iv	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	v	
<b>KATA PENGANTAR</b>	vi	
<b>DAFTAR ISI</b>	viii	
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	x	
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	xii	
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xiv	
<b>DAFTAR TABEL</b>	xv	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	xvi	
<b>ABSTRAK</b>	xvii	
<b><i>ABSTRACT</i></b>	xviii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
	A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
	B. Ruang Lingkup	7
	C. Tujuan Penelitian	9
	D. Tinjauan Pustaka	9
	E. Kerangka Pemikiran	14
	F. Metode Penelitian	17
	G. Sistematika Penulisan	22
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM KABUPATEN REMBANG</b>	23
	A. Kondisi Geografis dan Demografis	23
	B. Kondisi Sosial Ekonomi	29
	C. Kondisi Sosial Budaya	35
	D. Potensi Perikanan Tangkap	39
<b>BAB III</b>	<b>PERKEMBANGAN PENGGUNAAN CANTRANG DI KABUPATEN REMBANG</b>	44
	A. Perkembangan Penggunaan Kapal dan Alat Penangkap Ikan di Kabupaten Rembang	44
	B. Faktor Pendorong Penggunaan Cantrang di Kabupaten Rembang	55
	1. Kondisi Alat Tangkap Kurang Menguntungkan	55
	2. Kondisi Perairan dan Faktor Ekonomi Nelayan yang Miskin	58
	C. Perkembangan Penggunaan Cantrang	61

di Kabupaten Rembang

<b>BAB IV</b>	<b>KONFLIK PENGGUNAAN CANTRANG MASYARAKAT NELAYAN DI KABUPATEN REMBANG</b>	<b>75</b>
	A. Konflik Antarnelayan	76
	1. Insiden Tahun 1996	76
	2. Insiden Tahun 2009	81
	B. Penegakan Hukum Terhadap Larangan Penggunaan Cantrang Tahun 2005	84
	1. Izin Penangkapan Sulit	84
	2. Razia dan Pungutan Liar	89
	C. Larangan Penggunaan Cantrang Tahun 2015	98
	1. Upaya Pemerintah dalam Pelarangan Penggunaan Cantrang	98
	2. Upaya Nelayan dalam Penolakan Larangan Penggunaan Cantrang	102
	3. Toleransi Penggunaan Cantrang 30 GT	108
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN</b>	<b>114</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>116</b>
	<b>DAFTAR INFORMAN</b>	<b>124</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	<b>127</b>

## **DAFTAR SINGKATAN**

ABK	:	Anak Buah Kapal
API	:	Alat Penangkap Ikan
KAPI	:	Klasifikasi Alat Penangkap Ikan
DKP	:	Dinas Kelautan dan Perikanan
FNB	:	Forum Nelayan Bersatu
FNBR	:	Front Nelayan Bersatu Rembang
GPS	:	Global Positioning system
GT	:	Gross Tonage
HNSI	:	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
KBT	:	Kawasan Bahari Terpadu
Kamla	:	Keamanan Laut
Keppres	:	Keputusan Presiden
KIK	:	Kredit Investasi Kecil
KKP	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KM	:	Kapal Motor
MoU	:	Memorandum of Understanding
PADS	:	Pendapatan Asli Daerah Sendiri
Permen	:	Peraturan Menteri
PK	:	Paarden Kracht
PPI	:	Pelabuhan Pendaratan Ikan
PPP	:	Pelabuhan Perikanan Pantai
PUGAR	:	Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SIB	:	Surat Ijin Berlayar
SIKPI	:	Surat Izin Kapal Penangkut Ikan
SIPI	:	Surat Izin Penangkapan Ikan
SIUP	:	Surat Izin Usaha Penangkapan
SKK	:	Surat Keterangan Kecakapan
SLO	:	Surat Layak Operasi

TPI	:	Tempat Pelelangan Ikan
VSM	:	Vessel Monitoring System
WPP	:	Wilayah Pengelolaan Perikanan
ZEEI	:	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

## DAFTAR ISTILAH\*

Cantrang	:	Jenis jaring pukat kantong yang digunakan untuk menangkap ikan demersal yang dioperasikan di Rembang yang tidak dilengkapi dengan papan pembuka jaring yang pengoperasiannya tidak ditarik kapal berjalan.
<i>Cothok</i>	:	Jenis jaring pukat kantong yang dioperasikan di Rembang dengan sepasang alat pembuka jaring dalam operasional ditarik dan didorong dengan satu atau lebih kapal yang berjalan.
Dogol	:	Jenis jaring yang dioperasikan di Rembang untuk menangkap ikan teri.
<i>Fish Finder</i>	:	Alat bantu untuk menemukan dan mendeteksi keberadaan ikan.
<i>Fishing Day</i>	:	Waktu yang dibutuhkan dalam proses penangkapan ikan.
<i>Fishing Ground</i>	:	Kawasan/daerah penangkapan ikan.
<i>Gillnet</i>	:	Jenis jaring berbentuk persegi empat dengan ukuran mata jaring yang sama besar digunakan untuk menangkap ikan pelagis.
<i>Gross Tonage</i>	:	Bobot kotor perahu/kapal.
Ikan Demersal	:	Jenis ikan yang hidup di dasar laut.
Ikan Pelagis	:	Jenis ikan yang hidup di permukaan laut.
<i>In Board</i>	:	Mesin perahu/kapal yang menyatu dengan kapal.
Kethoprak	:	Wayang wong
Lampara	:	Nama lain dari dogol yang merupakan jenis jaring pukat kantong untuk menangkap ikan demersal.

---

\*Pengertian dalam daftar istilah ini disusun berdasar pada pendapat para ahli dalam kamus, referensi, dan pendapat pribadi.

Larung	:	Kegiatan menaiki kapal dan berputar-putar ditengah laut sebagai bagian dari rangkaian acara sedekah laut.
Lomban	:	Sedekah laut.
Out Board	:	Mesin perahu/kapal yang memisah atau berada di luar kapal.
Over Fishing	:	Penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebihan.
Payang	:	Jenis jaring pukat kantong yang operasikan di Rembang untuk menangkap gerombolan ikan pelagis.
Purse Seine	:	Pukat cincin/ Jenis jaring lingkaran yang dioperasikan di Rembang untuk menangkap gerombolan ikan pelagis.
Rumpon	:	Alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan daun kelapa yang umumnya terbuat dari bambu.
Sedekah laut	:	Tradisi/ kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur atas rizki yang diberikan oleh tuhan lantaran mencari ikan.
Sounder	:	Alat bantu untuk mengecek kedalaman air.
Stakeholder	:	Pemangku kepentingan.
Trammel net	:	Jenis jaring tiga lapis yang memiliki ukuran mata jaring kecil pada bagian dalam dan ukuran besar di bagian luar untuk menangkap ikan pelagis.
Trawl	:	Pukat harimau/ jaring pukat kantong dengan sepasang papan pembuka dalam pengoperasiannya ditarik menggunakan satu/lebih kapal berjalan.
Trip	:	Jarak pulang pergi dalam setiap kegiatan penangkapan ikan.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Peta Kabupaten Rembang	25
4.1	Demo Nelayan Rembang Menuntut Permudahan Surat Izin Usaha Kapal Cantrang.	86
4.2	Dukungan Nelayan Jawa Barat terhadap Kebijakan Menteri Susi	101
4.3	Unjuk Rasa Nelayan Pantura Atas Kebijakan Larangan Cantrang	103
4.4	Demo Nelayan Rembang Atas Kebijakan Larangan Cantrang	106

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2000.	25
2.2	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2004.	27
2.3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Rembang Tahun 2004.	28
2.4	Banyaknya Jenis Pekerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2007	30
2.5	Perkembangan Retribusi Hasil Lelang Perikanan Tangkap di TPI sebagai PAD Kabupaten Rembang Tahun 2009-2015.	32
3.1	Penggunaan Alat Penangkap Ikan di Kabupaten Rembang Tahun 1996-2015.	49
3.2	Penggunaan Armada Penangkap Ikan di Kabupaten Rembang Tahun 1996-2015.	53
3.3	Perkembangan Penggunaan Kapal Cantrang di Kabupaten Rembang Tahun 1996- 2015.	62
3.4	Perkembangan Produksi Perikanan Laut di Kabupaten Rembang Menurut TPI Tahun 2007-2012.	65
3.5	Perkembangan Penggunaan Cantrang Di Kabupaten Rembang Menurut Kecamatan/ TPI Tahun , 2002, 2004, 2006 dan 2015.	68
3.6	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Cantrang di Kabupaten Rembang Menurut Kwartal Tahun 2011-2015.	69
3.7	Penggunaan Kapal Cantrang di Kabupaten Rembang Menurut Bobot Tahun 2015.	70
3.8	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Rembang Tahun 1996-2015.	73

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
A. Peta Kabupaten Rembang.	127
B. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.	128

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Konflik Penggunaan Cantrang Masyarakat Nelayan di Kabupaten Rembang Tahun 1996-2015”, menggunakan metode sejarah dalam penulisannya. Permasalahan utama yang diajukan adalah bagaimana hubungan antara perkembangan penggunaan cantrang dengan konflik yang terjadi pada masyarakat nelayan akibat dari penggunaan cantrang. Penulisan skripsi ini menggunakan sumber sejarah yang dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu sumber primer, baik tertulis maupun lisan dan sumber sekunder.

Penggunaan *trawl* berdasarkan Keppres No. 39 Tahun 1980 secara resmi dilarang dioperasikan di perairan Indonesia, namun berakibat munculnya berbagai modifikasi alat tangkap *trawl* yang berkembang sesuai dengan nama daerah masing-masing yaitu cantrang, arad, *cothok*, dogol, payang dan lampara. Penghapusan *trawl* digantikan dengan penggunaan alat penangkap ikan ramah lingkungan yang diperkenalkan pemerintah yaitu *purse seine* dengan membutuhkan modal yang besar sehingga menyebabkan para nelayan berganti menggunakan alat tangkap modifikasi *trawl* salah satunya adalah cantrang. Cantrang bermodal sedikit dan memiliki waktu penangkapan lebih singkat. Dalam perkembangannya, cantrang sama halnya dengan *trawl* dimana pengoperasiannya sering menimbulkan konflik antara nelayan cantrang yang berteknologi modern dengan nelayan kecil yang beralat tangkap sederhana. Konflik muncul karena adanya pelanggaran terhadap ukuran mesin dan daerah penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan cantrang. Akibatnya, pendapatan nelayan kecil menurun karena daerah penangkapan mereka sulit ditemukan ikan, sedangkan kondisi mereka tidak bisa melakukan pelayaran di perairan yang lebih jauh. Selain kondisi tersebut, pengoperasian cantrang tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem dasar laut dan tangkapannya tidak selektif menyebabkan ikan-ikan kecil dan komponen laut lainnya ikut terangkut. Berdasar pada kondisi tersebut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 melarang penggunaan cantrang dioperasikan di seluruh wilayah perairan Indonesia

Penggunaan cantrang tahun 1996-2015 merupakan alat tangkap yang dinilai menguntungkan bagi nelayan cantrang. Selain itu, cantrang telah menciptakan ketegangan pada masyarakat nelayan karena nelayan cantrang sering menimbulkan konflik yaitu perebutan daerah penangkapan ikan dan pelanggaran terhadap ukuran mesin. Dengan kondisi tersebut, pemerintah menindaklanjuti penggunaan cantrang dengan menegakkan hukum terhadap larangan penggunaan cantrang sebagai upaya mengurangi berbagai bentuk konflik dan melindungi ekosistem laut.

## **ABSTRACT**

*This thesis entitled "Conflict of the Use of Cantrang by Fisherman Society in Rembang Regency in 1996-2015", used the historical method in process its writing. The main problem that that raised is how the relationship between the use of the program and the issues that can occur in fishing communities from the use of cantrang. Writing this thesis used historical source can be categorized into two types, namely primary, both written and oral and also secondary.*

*The used of trawl based on Presidential Decree No. 39 of 1980 was officially banned from operating in Indonesian waters, but resulted in the emergence of various modifications of trawl fishing gear that developed according to the names of each region namely cantrang, arad, cothok, dogol, payang dan lampara. Trawl removal has replaced with the use of environmentally friendly fishing gear equipment introduction by government, namely purse seine, which requires large capital, causing fishermen to change using trawl modification fishing tools, one of which is cantrang. cantrang has a little capital and has a shorter catch time. In its development, cantrang is the same as trawl where its operations often creates conflict between cantrang fisherman who are modern technology with small fisherman who use simple fishing gear. The conflict arose because of a violation of the size of the engine and the fishing area carried out by cantrang fisherman. As a result, the income of small fisherman is decreasing, because their fish in areas are difficult to find fish, while their condition cannot be sailed in further waters. In addition to these conditions, cantrang operations did not pay attention to the balance of the seabed ecosystem and the catch is not selective, causing small fish and other marine components to be transported. Based on these conditions, the regulation of the Ministry of Maritime and Fisheries Affairs No. 2 of 2015 prohibits the use of cantrang operated in all Indonesian territorial waters.*

*The use of cantrang in 1996-2015 was a fishing gear which was considered beneficial for cantrang fishermen. In addition cantrang has created tension in fishing communities because cantrang fishermen often caused conflict, namely the seizure of fishing areas and violation of engine size. Under these conditions, the Government followed up on the use of cantrang by enforcing the law against the ban on the use of cantrang as an effort to reduce various forms of conflict and protect marine ecosystems.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Sumber daya alam termasuk kelautan dan perikanan di Indonesia memiliki peran penting bagi pembangunan nasional, meliputi pembangunan pada aspek ekonomi, sosial, keamanan ataupun ekologis. Wilayah kepulauan Indonesia sangat memungkinkan bangsanya untuk membangun perekonomian berdasarkan pada basis sumber daya kelautan dan perikanan.<sup>1</sup> Sumber daya perikanan merupakan salah satu sumber daya yang sering dieksploitasi tanpa batas. Sumber daya perikanan memiliki potensi perikanan laut yang terdiri dari sumber daya pelagis besar dan pelagis kecil.<sup>2</sup>

Potensi sumber daya alam Indonesia dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia karena memiliki potensi kekayaan sumber daya perikanan yang relatif besar. Sektor perikanan juga menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari kegiatan penangkapan, budidaya, pengolahan, distribusi dan perdagangan. Kondisi Pantai Utara Jawa Tengah yang landai dan perairan yang relatif tenang menjadikan Pantai Utara Jawa Tengah sebagai daerah yang memiliki cukup banyak usaha penangkapan ikan terutama bagi nelayan yang berskala kecil dan menengah. Di Jawa Tengah pembangunan perikanan telah dilaksanakan dari tahun ke tahun memiliki peranan yang strategis di mana potensi perikanan dan kelautan telah dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan pembangunan salah satunya dalam pembangunan nasional.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Apidar dkk, *Ekonomi Kelautan dan Pesisir* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 23

<sup>2</sup>S, Mulyadi, *Ekonomi Kelautan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 3.

<sup>3</sup>“Profil Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah” (Pusat Data Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013), hlm. 37.

Perairan laut Indonesia merupakan wilayah milik bersama yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Anggapan bahwa wilayah laut Indonesia merupakan kekayaan milik bersama menjadikan siapapun berhak melakukan eksploitasi terhadap sumber daya perikanan sehingga menyebabkan konflik klaim dan perebutan daerah penangkapan seperti yang terjadi di perairan Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal tersebut menyebabkan pemanfaatan laut terbuka dan akses terhadap sumber daya perikanan untuk siapapun sulit dibatasi. Akibatnya, beberapa kelompok masyarakat berhak melakukan eksploitasi terhadap sumber daya perikanan dengan menggunakan berbagai jenis alat penangkap ikan sebagai pemenuhan sumber bahan pangan. Demikian pula dengan kuatnya pandangan masyarakat bahwa sumber daya perikanan tidak akan pernah habis semakin menderaskan arus eksploitasi.<sup>4</sup>

Adanya Kebijakan Pemerintah pada Orde Baru tahun 1975 dengan diberlakukannya kredit motor tempel terhadap kapal nelayan dan penambahan terhadap penggunaan kapal motor yang sesuai pada program PELITA II menyebabkan terjadi perkembangan alat tangkap dan kapal kearah yang lebih modern salah satunya kapal motor yang beroperasi menggunakan alat tangkap *trawl*.<sup>5</sup> Penggunaan *trawl* menimbulkan persaingan antara nelayan yang menggunakan alat tangkap modern dalam skala besar dengan masyarakat nelayan kecil, bahkan telah menimbulkan banyak kerugian. Penggunaan *trawl* merusak lingkungan laut dan menguras ketersediaan sumber daya laut karena melakukan penangkapan ikan dengan tidak memperhatikan aspek lingkungan. Nelayan *trawl* pada umumnya melakukan penangkapan ikan secara besar-besaran dan

---

<sup>4</sup>Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Alam* (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara, 2006), hlm. 108.

<sup>5</sup>Winarto, "Motorisasi Perahu Nelayan Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Pacar Kecamatan Kota Kabupaten Rembang Tahun 1975-2000" (Program Studi Pascasarjana, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Semarang: 2011), hlm. 54.

menangkap berbagai jenis ikan yang berukuran kecil sehingga cepat atau lambat menyebabkan regenerasi ikan akan terputus. Hal-hal tersebut telah menciptakan konflik perebutan sumber daya perikanan karena nelayan kecil menganggap bahwa penggunaan kapal gandeng pada pukat *trawl* merusak keberadaan potensi laut dalam jangka pendek maupun panjang.<sup>6</sup>

Terbitnya keputusan penghapusan penggunaan *trawl* secara bertahap melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang penghapusan *trawl* merupakan upaya Pemerintah untuk melarang penggunaan *trawl* bagi nelayan di seluruh wilayah perairan Indonesia yang memiliki tujuan menghindari ketegangan-ketegangan sosial antara nelayan tradisional dengan nelayan *trawl*. Kapal *trawl* pada akhirnya digantikan Pemerintah dengan penggunaan alat tangkap *purse seine* yang lebih ramah lingkungan dengan bantuan program Pemerintah yakni KIK dan Bimas sebagai alternatif bagi nelayan terutama yang terkena dampak penghapusan *trawl*. Hal tersebut terbukti dari penurunan jumlah kapal *trawl* dan penggunaan kapal *purse seine* semakin meningkat.<sup>7</sup> Sektor kelautan dan perikanan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Orde Baru sejak tahun 1970-an dengan adanya berbagai program pemerintah dalam membantu usaha nelayan kecil dalam meningkatkan produksi perikanan mereka.<sup>8</sup>

Berdasar pada fakta-fakta empiris menunjukkan bahwa kawasan padat nelayan seperti Laut Jawa masih banyak ditemukan beberapa modifikasi dan diversifikasi alat tangkap *trawl* untuk menangkap segala spesies ikan yang

---

<sup>6</sup>Arisandi, “Inkonsistensi Kebijakan Penggunaan Jaring *Trawl*: (Studi Kasus Penggunaan Jaring *Trawl* Oleh Nelayan Wilayah Perairan Gresik)” Program Pascasarjana Ilmu Kepolisian Universitas Airlangga Surabaya, (Jurnal Penelitian Vol. 4 No. 1, 2016), hlm. 3.

<sup>7</sup>Sutejo K. Widodo, *Ikan Layang Terbang Menjulung: Perkembangan Pelabuhan Pekalongan Menjadi Pelabuhan Perikanan 1900-1990* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang dan Toyota Foundation, Semarang: 2005), hlm. 133.

<sup>8</sup>Sutejo K. Widodo, “Identifikasi Terhadap Konflik Terbuka Pada Masyarakat Nelayan di Kabupaten Rembang: Kasus di Desa Pasar Banggi” (Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Semarang, 1997), hlm. 4.

dioperasikan nelayan Pantura.<sup>9</sup> Beberapa alat tangkap tersebut meliputi arad, *cothok*, dogol, payang, lampara dan cantrang yang berkembang pesat dengan nama lain di berbagai daerah masing-masing. Menjelang krisis ekonomi Indonesia yang mencapai puncaknya di tahun 1998 membuat posisi alat tangkap cantrang semakin marak dioperasikan nelayan seiring dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang diikuti oleh melemahnya kontrol keamanan dan himpitan kondisi ekonomi Indonesia.<sup>10</sup>

Salah satu daerah Pantai Utara Jawa yang padat menggunakan cantrang adalah masyarakat nelayan di Kabupaten Rembang. Penggunaan cantrang secara masif dioperasikan nelayan Rembang mengalami perkembangan yang positif yang terbukti pada peningkatan produksi perikanan dimana penggunaan kapal cantrang dianggap memberikan rente ekonomi yang cukup tinggi dalam bidang kelautan dan perikanan. Penerimaan produksi perikanan laut tahun 1996 memiliki jumlah 27.053.857 kg hingga meningkat sebesar 60.904.207 kg ikan di seluruh TPI di Kabupaten Rembang, sebesar 19.685.035 kg merupakan kontribusi produksi perikanan cantrang di tahun 2015.<sup>11</sup>

Perkembangan cantrang dalam kenyataannya tidak bisa lepas dari munculnya konflik seperti yang terjadi pada penggunaan *trawl*. Berbagai konflik cantrang menyebabkan ketegangan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern baik secara individu maupun kelompok. Konflik tersebut terjadi pada tahun-tahun tertentu diantaranya pada tahun 1996 yang disebabkan karena kompetisi dan persaingan penggunaan alat tangkap yang telah memicu perebutan sumber daya ikan sehingga menyebabkan pelanggaran *fishing ground* di berbagai wilayah perairan. Pada 2009 konflik muncul kembali yang dipicu karena rusaknya berbagai alat tangkap rajungan yang disebabkan karena terseret jaring cantrang yang tidak ramah lingkungan. Selain itu penggunaan cantrang juga berakibat

---

<sup>9</sup>Pujo Semedi Hargo Yuwono, "Otonomi Daerah Di Sektor Penangkapan Ikan" (Jurnal Populasi Nomor 13 Vol. 1, 2002), hlm 28-29.

<sup>10</sup>Trias Purwadi, "Diskriminasi Penggunaan Kapal Cantrang", *Suara Merdeka*, 22 Oktober 2008.

<sup>11</sup>Laporan Tahunan DKP Kabupaten Rembang Tahun 2015, hlm. 21.

serius terhadap timbulnya masalah kerusakan ekologi kelautan dan kerawanan sosial ekonomi pada komunitas kawasan pesisir sehingga semakin menyuburkan pertentangan dan konflik antarnelayan maupun dengan Pemerintah.<sup>12</sup>

Pada 2005 terbit Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 mengenai larangan penggunaan cantrang dengan kekuatan lebih dari 30 GT. Dalam prakteknya peraturan ini disalahartikan oleh para nelayan bahwa kapal dibawah 30 GT diperbolehkan terjun bebas dioperasikan oleh nelayan sehingga penggunaan kapal cantrang di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Sebanyak 3.209 unit kapal cantrang pada tahun 2004 menjadi 5.100 unit pada tahun 2007 dengan ukuran kapal sebagian besar di atas 30 GT. Peningkatan jumlah kapal cantrang dibawah 30 GT semakin marak dioperasikan nelayan membuat kawasan Laut Jawa diketati aktivitas patroli para keamanan laut demi menertibkan dan menegakkan hukum.<sup>13</sup> Berbagai upaya razia dan penangkapan terhadap kapal cantrang yang melakukan pelanggaran merupakan salah satu wujud tindakan yang tegas. Cantrang yang semakin aktif beroperasi menangkap ikan pada dasar perairan dengan kapal 30 GT hingga diatas 30 GT dengan tidak memperhatikan aspek ekologis dan memporak-morandakan ekosistem bawah laut sangat mengganggu keseimbangan ekosistem dan tumbuh kembang ikan-ikan kecil.<sup>14</sup>

Berdasar pada kondisi tersebut, terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela/*Trawl* dan Pukat Tarik/*Seine Nets* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia menjelaskan bahwa salah satu jenis alat tangkap pukat tarik yang dilarang adalah cantrang. Pada pasal 4 ayat 2 huruf e cantrang termasuk dalam jenis alat penangkapan ikan pukat tarik berkapal. Mulai terbitnya Peraturan Menteri tersebut, penggunaan cantrang dilarang secara tegas beroperasi di wilayah

---

<sup>12</sup>Kusnadi, *Konflik Sosial...*, hlm. 108.

<sup>13</sup>Trias Purwadi, "Diskriminasi Penggunaan Kapal Cantrang", *Suara Merdeka*, 22 Oktober 2008.

<sup>14</sup>"Pelarangan Pukat Demi Pemulihan" *Kompas*, 3 Februari 2015, hlm 14.

perairan Indonesia, meskipun menimbulkan protes dari berbagai kalangan pengusaha ikan maupun nelayan pantura karena peraturan tersebut dianggap mengganggu perekonomian nelayan di samping juga mengganggu pola kemitraan lokal yang selama ini dilakukan oleh kapal-kapal nelayan lokal.<sup>15</sup> Peraturan tersebut sesuai dengan kewenangan Menteri untuk mengeluarkan peraturan sesuai dengan isi Pasal 7 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut skripsi dirumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. *Pertama*, faktor-faktor apa saja yang mendorong perkembangan penggunaan cantrang di Kabupaten Rembang Tahun 1996-2015. *Kedua*, bagaimana perkembangan penggunaan cantrang di Kabupaten Rembang tahun 1996-2015. *Ketiga*, bagaimana konflik penggunaan cantrang masyarakat nelayan di Kabupaten Rembang tahun 1996-2015.

## **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian sejarah dilakukan agar sebuah penelitian dapat lebih fokus dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara empiris dan metodologis.<sup>16</sup> Penelitian sejarah mengenal tiga ruang lingkup yaitu, ruang lingkup temporal, ruang lingkup spasial dan ruang lingkup keilmuan.

Ruang lingkup temporal skripsi ini adalah antara tahun 1996 sampai dengan tahun 2015. Tahun 1996 dipilih sebagai batas awal kajian dengan alasan bahwa pada tahun tersebut cantrang di Kabupaten Rembang menimbulkan konflik pelanggaran daerah penangkapan oleh nelayan cantrang dimana nelayan cantrang mencari ikan di jalur penangkapan I yang merupakan jalur penangkapan nelayan kecil. Kondisi tersebut menyebabkan produktifitas hasil tangkapan nelayan

---

<sup>15</sup>M. Faizal Reza Pahlevi dan Zainal Hidayat, “Implementasi Kebijakan Pelarangan Alat Tangkap Cantrang Di Kabupaten Rembang” (Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro”, Semarang: 2015), hlm 3.

<sup>16</sup>Taufik Abdullah, editor, *Sejarah Lokal di Indonesia: Kumpulan Tulisan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 10.

tradisional menurun karena ikan sulit ditemukan dan terkuras habis. Pada dua tahun sebelum krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998 cantrang sudah berkembang di masyarakat dan menciptakan konflik.<sup>17</sup>

Tahun 2015, dipilih sebagai batas akhir penelitian dengan alasan bahwa pada tahun tersebut dikeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap jenis Pukat Hela dan Pukat Tarik di seluruh wilayah perairan Indonesia.<sup>18</sup> Peraturan tersebut sebagai upaya tindakan hukum pemerintah untuk menertibkan penggunaan pukat tarik termasuk cantrang yang merusak keseimbangan ekosistem laut. Sebagai akibat dari terbitnya peraturan tersebut, muncul konflik kecemburuan sosial antarnelayan di Kabupaten Rembang. Konflik terjadi dimana nelayan cantrang menutup akses sandar kapal di PPP Tasikagung Rembang dan menutup aktivitas lelang TPI Tasik Agung I. Penutupan tersebut berlaku bagi kapal non-cantrang yaitu sebanyak 450 kapal pukat cincin dan 500 kapal jaring siang malam. Akibatnya, kapal tersebut tidak bisa merapat ke pelabuhan untuk menyandarkan kapalnya, sehingga nelayan non-cantrang kembali ke kampung halaman untuk menyandarkan kapalnya di Tempat Pelelangan Ikan di daerah Pandangan Wetan dan menurunkan hasil-hasil ikannya di TPI Pandangan Wetan.<sup>19</sup>

Lingkup spasial dalam skripsi ini di fokuskan pada Kabupaten Rembang. Pertimbangan utama pemilihan Kabupaten Rembang didasari oleh kenyataan bahwa Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah pesisir Jawa Tengah yang memiliki panjang garis pantai 63,5 km dari 289,07 km panjang garis pantai

---

<sup>17</sup>Nelayan Tradisional Rembang Menjerit Karena Cantrang, *Kompas*, 27 April 1996.

<sup>18</sup>Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen Kp/2015 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2015 berupa larangan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan jenis pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang mana termasuk di dalamnya adalah pukat tarik berkapal salah satunya jenis cantrang.

<sup>19</sup>“Larangan Cantrang Timbulkan Konflik”, *Kompas*, 09 Maret 2015.

Jawa Tengah yang terkena dampak atas terbitnya Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 mengenai larangan penggunaan pukat tarik di seluruh wilayah perairan Indonesia. Selain itu, pemilihan spasial didasari karena Kabupaten Rembang merupakan kabupaten yang berada di pesisir Jawa Tengah yang memiliki jumlah kapal cantrang sebanyak 331 unit di tahun 2015 sebagai pemilik jumlah kapal cantrang tertinggi kedua setelah Kota Tegal yaitu sebanyak 349 unit.<sup>20</sup>

Lingkup keilmuan skripsi ini adalah sejarah sosial maritim. Fokus kajian sejarah sosial umumnya menyangkut semua kegiatan yang berhubungan dengan gejala atau fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya kehidupan nelayan. Kehidupan manusia pada umumnya tidak bisa lepas dari konflik. Penelitian ini mengulas tentang konflik penggunaan cantrang pada masyarakat nelayan di Kabupaten Rembang. Konflik tersebut muncul karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adanya kompetisi antara nelayan cantrang dengan nelayan kecil. Kompetisi tersebut berupa persaingan penggunaan alat tangkap modern cantrang dengan alat tangkap tradisional sehingga semakin menyuburkan kompetisi kedua nelayan tersebut. Konflik tumbuh subur karena nelayan cantrang yang berteknologi modern melakukan pelanggaran daerah penangkapan ikan yaitu mencari ikan di jalur penangkapan I yang merupakan daerah penangkapan ikan nelayan tradisional/kecil.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan dan batasan ruang lingkup di atas, di dalam penelitian ini di kembangkan beberapa tujuan penelitian untuk memperjelas fokus analisis sebagai berikut. Tujuan yang *pertama*, untuk menjelaskan perkembangan penggunaan alat tangkap cantrang di Kabupaten Rembang tahun 1996-2015. *Kedua*, menemukan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perkembangan penggunaan cantrang di Kabupaten Rembang

---

<sup>20</sup>“Seminar Problematika Cantrang dan Impor Garam di Negara Maritim: Kebijakan Poros Maritim Pemerintah Terhadap Kemajuan Jawa Tengah” (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, 2-3 Maret 2018).

Tahun 1996-2015. *Ketiga* untuk menjelaskan konflik penggunaan cantrang masyarakat nelayan di Kabupaten Rembang tahun 1996-2015.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang masyarakat pesisir, konflik nelayan, penggunaan alat tangkap, dan produksi perikanan sudah banyak dilakukan dan diajukan sebagai acuan, serta telaah dalam skripsi ini. Buku *pertama* adalah karya Kusnadi yang berjudul *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Alam*.<sup>21</sup> Buku ini membahas mengenai masyarakat nelayan dan konflik yang terjadi di Pesisir Utara Jawa Timur dalam memperebutkan sumber daya perikanan. Adanya akses laut yang merupakan sumber daya milik umum yang kepemilikannya terbuka bagi siapapun mendorong para pihak yang berkepentingan melakukan eksploitasi sumber daya secara bebas. Selain itu dengan anggapan bahwa sumber daya perikanan tidak akan pernah habis merupakan persepsi-persepsi individu maupun kelompok untuk melancarkan arus eksploitasi sumber daya perikanan secara optimal.

Dalam buku ini menjelaskan beberapa konflik yang terjadi pada nelayan di Jawa Timur. Faktor penyebab munculnya konflik tersebut karena bentrok antarnelayan yang berebut daerah penangkapan ikan dan klaim batas wilayah penangkapan. Nelayan Madura mengklaim bahwa perairan Karangmuang Madura merupakan perairan yang dikuasai oleh nelayan setempat. Nelayan Madura meminta agar nelayan Lamongan tidak menangkap ikan pada perairan tersebut. Berdasarkan salah satu konflik di Jawa Timur tersebut, secara umum konflik terjadi akibat adanya tekanan penduduk, adanya perbedaan tingkat teknologi, keterbatasan teritorial dan jumlah nelayan memperebutkannya. Selain itu faktor keuntungan ekonomis terhadap hasil produksi ikan menjadi salah satu pemicu timbulnya konflik perebutan sumber daya perikanan.

---

<sup>21</sup>Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Alam* (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara, 2006).

Relevansi buku ini dengan kajian adalah memberikan gambaran faktor-faktor utama penyebab terjadinya konflik sosial antar nelayan yang terjadi di Pesisir Jawa Timur yang disebabkan karena penggunaan alat tangkap dan klaim batas wilayah penangkapan. Konflik tersebut mirip dengan konflik yang terjadi pada alat tangkap cantrang yaitu adanya sengketa antara nelayan tradisional dengan nelayan cantrang sehingga menyebabkan konflik perebutan daerah penangkapan. Alat tangkap yang semakin modern teknologinya semakin memiliki hak dan kekuasaan atas ketersediaan sumber daya perikanan.

Pustaka *kedua* adalah tesis dari Mochammad Salim yang berjudul “Dinamika Kebijakan Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rembang Pada Masa Reformasi Dan Otonomi Daerah Tahun 1998 – 2008”.<sup>22</sup> Tesis ini membahas mengenai dinamika kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mengatur sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rembang. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 dimana nilai produktivitas hasil perikanan mengalami penurunan.

Dalam tesis ini menjelaskan kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Rembang beberapa diantaranya untuk mengembangkan potensi perikanan tangkap dengan upaya melakukan modernisasi armada penangkapan dan alat tangkap ikan. Modernisasi armada penangkapan dilakukan dengan peningkatan kapal motor jenis cantrang dan *purse seine* yang dianggap masih memberikan rente ekonomi yang cukup besar, sehingga menjadi daya tarik perkembangan usaha penangkapan di Kabupaten Rembang. Selain itu, Pemerintah melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana PPI dan menyediakan infrastruktur publik di sektor Kelautan dan Perikanan, seperti pembangunan KBT yang ditunjang dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk menunjang jalannya usaha penangkapan ikan dan sebagainya di wilayah Kabupaten Rembang. Kebijakan dalam sektor kelautan dan perikanan juga diarahkan pada peningkatan

---

<sup>22</sup>Mochammad Salim, “Dinamika Kebijakan Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rembang Pada Masa Reformasi Dan Otonomi Daerah Tahun 1998 – 2008” (Program Pasca Sarjana Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 2010).

kapasitas PPI dengan penambahan panjang jetty menjadi 1000 meter untuk memudahkan kapal-kapal besar termasuk cantrang baik dari Rembang maupun kapal-kapal luar daerah untuk menyandarkan kapal mereka di Rembang dan menjual hasil tangkapannya di TPI Rembang agar dapat menambah kontribusi produksi perikanan untuk PAD Rembang.

Tesis ini relevan dengan kajian, karena tesis ini menjelaskan beberapa kebijakan kelautan dan perikanan yang diambil Pemerintah Kabupaten mengenai penambahan jumlah kapal motor berjenis cantrang guna untuk meningkatkan pendapatan ekonomi daerah. Kebijakan ini terlihat nyata sukses pada perkembangan penggunaan cantrang di Kabupaten Rembang yang mengalami peningkatan tajam dari 96 unit cantrang di tahun 1996 hingga mencapai 331 unit cantrang di tahun 2015. Melalui kebijakan tersebut menunjukkan adanya dukungan pemerintah dalam mengembangkan cantrang menggunakan jenis kapal motor untuk meningkatkan produktivitas perikanan dengan *fishing ground* yang lebih jauh.

Pustaka *ketiga*, adalah laporan penelitian dari Siti Hajar Suryawati dan Radityo Pramoda yang berjudul “Dampak Ekonomi Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 Terhadap Aktivitas Usaha Nelayan Cantrang di Kota Probolinggo, Jawa Timur”.<sup>23</sup> Laporan penelitian tersebut menjelaskan tentang dampak yang timbul akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 terhadap aktivitas usaha nelayan cantrang di Kota Probolinggo terhadap ekonomi nelayan yang meliputi aspek pendapatan, kerugian asset usaha, modal usaha serta mekanisme pemasaran. Terbitnya Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 disebabkan karena konflik yang sering terjadi saat ini, yang bersentuhan langsung antara nelayan cantrang dan dengan nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap non-cantrang.

---

<sup>23</sup>Siti Hajar Suryawati dan Radityo Pramoda, “Dampak Ekonomi Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 Terhadap Aktivitas Usaha Nelayan Cantrang di Kota Probolinggo, Jawa Timur” (Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Buletin Ilmiah “MARINA” Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 2 No. 2, halaman 45-55, Jakarta: 2015).

Dampak ekonomi akibat terbitnya larangan tersebut terjadi dari berbagai kalangan di Kota Probolinggo. Pemerintah mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000/tahun produksi perikanan yang masuk dalam PAD Kota Probolinggo. Belum lagi resiko Pemerintah yang digegerkan oleh aksi para nelayan dalam demo menuntut pelegalan dalam penggunaan cantrang.

Analisis dampak ekonomi yang menimpa nelayan pemilik cantrang lebih besar dari pada yang dialami Pemerintah. Penurunan pendapatan, kehilangan mata pencaharian dan resiko hilangnya nilai aset produksi menjadi permasalahan yang dialami para pemilik kapal, belum lagi para ABK cantrang yang hidup dari upah kerja pada kapal cantrang dimana mereka mengalami banyak kerugian ekonomi. Para juragan kapal cantrang yang mengalami kerugian karena pendapatannya turun terpaksa memberhentikan para ABK dan berakibat pada maraknya pengangguran karena hilangnya mata pencaharian.

Relevansi laporan penelitian dengan skripsi berusaha memberi gambaran dampak yang ditimbulkan dari terbitnya Peraturan Menteri No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan cantrang di Kota Probolinggo. Dampak ekonomi terlihat secara signifikan terutama pada para pemilik kapal cantrang dan para ABK. Peraturan tersebut pun menimbulkan resiko yang besar bagi Pemerintah karena berbagai muncul aksi penolakan terhadap berlakunya kebijakan yang menyengsarakan para nelayan cantrang tersebut.

Pustaka *keempat* adalah jurnal penelitian dari Suherman Banon Atmaja dan Duto Nugroho yang berjudul “Distribusi Spasial Upaya Penangkapan Kapal Cantrang dan Permasalahannya di Laut Jawa”.<sup>24</sup> Jurnal ini menjelaskan tentang daerah penangkapan cantrang telah menyebar di hampir seluruh Laut Jawa yang terkonsentrasi di Selatan Belitung dan Selatan Kalimantan sampai Selat Makassar. Perluasan daerah penangkapan 12 mil berdasarkan atas izin provinsi menunjukkan pengalokasian armada perikanan cantrang untuk

---

<sup>24</sup>Suherman Banon Atmaja dan Duto Nugroho, “Distribusi Spasial Upaya Penangkapan Kapal Cantrang Dan Permasalahannya Di Laut Jawa” (Balai Penelitian Perikanan Laut, Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan, Vol.18 No. 4, halaman 234-241, Jakarta: 2012).

meminimalisir terjadinya kompetisi dan konflik dengan nelayan lokal. Pencapaian daerah upaya penangkapan cantrang dipengaruhi oleh pengalaman nakhoda, sumber daya ikan target, dan juga adanya operasi razia yang dilakukan oleh TNI AL dan Polair.

Dalam jurnal ini dijelaskan pula banyaknya pelanggaran disebabkan maraknya penggunaan kapal cantrang dimana banyak pemilik kapal yang memodifikasi kapal pukat cincin menjadi kapal cantrang dan adanya manipulasi bobot dan ukuran kapal dan banyaknya berbagai bobot/ukuran kapal cantrang telah beroperasi di Laut Jawa. Umumnya kapal cantrang yang memiliki ukuran diatas 20 GT daerah penangkapannya sudah keluar dari pesisir utara Pulau Jawa dengan waktu tempuh sekitar 2–3 hari, kecuali di daerah penangkapan yang relatif lebih dekat dengan Pulau Jawa di perairan utara Brebes. Selama kurun waktu 2009-2010 memperlihatkan bahwa penyebaran daerah penangkapan terkonsentrasi di bagian timur Laut Jawa dan Kalimantan Selatan.

Pustaka ini relevan dengan kajian karena menjelaskan mengenai beberapa daerah yang menjadi pusat utama persebaran penangkapan cantrang. Selain itu juga memberi gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya konflik dan kompetisi antarnelayan di Laut Jawa sehingga dapat dijadikan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji timbulnya konflik yang terjadi antarnelayan di Kabupaten Rembang.

Berbeda dengan pustaka-pustaka tersebut diatas, skripsi ini fokus pada perkembangan dan proses munculnya konflik penggunaan cantrang di Kabupaten Rembang tahun 1996-2015. Melalui penjelasan yang mendetai dari berbagai konflik dan permasalahan penggunaan cantrang di Kabupaten Rembang, diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang penggunaan alat penangkap ikan tradisional maupun modern di Kabupaten Rembang.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Skripsi ini membahas tentang “Konflik Penggunaan Cantrang Masyarakat Nelayan di Kabupaten Rembang Tahun 1996–2015”. Dalam memahami

perkembangan, konflik, permasalahan dan faktor penyebab penggunaan cantrang penulis menggunakan pendekatan sosial.

Konflik diartikan sebuah gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial yang akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu dimana saja dan kapan saja. Konflik biasanya timbul sebagai akibat dari persaingan antara paling tidak dua belah pihak dalam suatu lapisan kelas sosial. Konflik juga diartikan sebagai sebuah perselisihan atau persengketaan antara dua atau lebih baik secara individu atau kelompok yang kedua belah pihak sama-sama memiliki keinginan untuk saling menjatuhkan, menyingkirkan, mengalahkan atau menyisihkan.<sup>25</sup>

Nelayan diartikan sebagai suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara menangkap ikan ataupun budidaya. Mereka umumnya tinggal di pesisir pantai yang lebih dekat dengan kegiatannya. Klasifikasi masyarakat nelayan dapat ditinjau dari dua sudut pandang.<sup>26</sup> *Pertama*, dilihat dari tingkat skala investasi modal, terbagi menjadi nelayan besar dan nelayan kecil. *Kedua*, dilihat dari tingkat teknologi peralatan tangkap terbagi menjadi nelayan modern dan nelayan tradisional.<sup>27</sup>

Teori konflik menurut Lewis A. Coser merupakan sebuah permusuhan dalam sebuah hubungan sosial. Konflik selalu bersifat tidak baik dan berusaha memecah belah ataupun merusak kedua belah pihak baik individu maupun kelompok.<sup>28</sup> Menurut Ogburn adanya konflik menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena perbedaan penggunaan teknologi. Contoh konkrit pada masyarakat nelayan adalah konflik penggunaan alat tangkap karena perbedaan teknologi. Teknologi tersebut yaitu teknologi modern pada nelayan cantrang yang muncul sebagai kelompok kelas atas yang

---

<sup>25</sup>Elly M Setiadi dan Usman, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 347.

<sup>26</sup>Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, hlm. 6.

<sup>27</sup>Kusnadi, *Konflik Sosial...*, hlm. 3.

<sup>28</sup>Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 48.

kuat dan berusaha menguasai maupun mengeksploitasi sumber daya ikan sebanyak-banyaknya dan nelayan teknologi tradisional sebagai kelas bawah yang lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk menentang kelas di atasnya. Konflik tersebut dianggap sebagai konflik horizontal. Adanya sekelompok masyarakat yang dieksploitasi (nelayan tradisional) terjadi karena adanya kedudukan kelas dalam masyarakat yang menguasai sarana produksi yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat (nelayan modern).<sup>29</sup>

Cantrang merupakan kelompok alat penangkap ikan jenis pukot tarik berkantong/*cod-end* tanpa alat pembuka mulut jaring. Cantrang merupakan jenis pukot tarik berkapal. Pukot tarik berkapal diantaranya meliputi *dogol/danish seines*, *scottish seines*, *pair seines*, payang, dan lampara dasar.<sup>30</sup> Konstruksinya yang terbuat dari jaring dengan bagian dua buah sayap, badan dan kantong yang dilengkapi dengan tali atau tambang besar untuk bagian pengikat merupakan ciri dari alat tangkap cantrang yang berteknologi modern. Pengoperasian cantrang dilakukan dengan cara melingkari gerombolan/*schooling* ikan dan menariknya ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui kedua bagian sayap dan tali selambar, pada permukaan, kolom maupun dasar perairan umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal tergantung jenis pukot tarik yang digunakan. Pukot tarik pantai dioperasikan di daerah pantai untuk menangkap ikan pelagis dan demersal yang hidup di daerah pantai.<sup>31</sup>

Kemunculan cantrang berakar dari penghapusan *trawl* tahun 1980 dengan cara kerja menangkap segala spesies ikan dan merusak ekosistem laut sehingga dilarang dioperasikan di wilayah perairan Indonesia. Peningkatan penggunaan alat tangkap *trawl* didorong oleh kelebihan produksi dan hasil *trawl* lebih banyak

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 101-102.

<sup>30</sup>Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

<sup>31</sup>Sudirman, *Mengenal Alat Dan Metode Penangkapan Ikan* (Bandung: Rineka Cipta, 2013), hlm. 196.

karena memiliki mata jaring yang lebih rapat.<sup>32</sup> Alat penangkapan ikan jenis *trawl* yang berkembang di masyarakat, banyak ditemukan dalam bentuk serta nama yang beragam dan sifat penangkapannya tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan karena *trawl* mengeruk dasar perairan dan menggunakan mata jaring yang kecil, sehingga sumber daya ikan yang masih anakan ikut tertangkap. Penggunaan *trawl* di Indonesia dalam prakteknya menunjukkan sebuah penurunan tingkat kesejahteraan nelayan tradisional sehingga berdampak buruk. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980, tentang Penghapusan Jaring *Trawl*/Pukat Harimau di Perairan Jawa, Sumatera, dan Bali, dibentuk dalam rangka menjaga kesehatan habitat serta produktivitas penangkapan nelayan tradisional.<sup>33</sup>

Terbitnya keputusan Pemerintah tentang penghapusan *trawl* di Indonesia, berdampak pada penggunaan alat tangkap pukat cincin/*purse seine* yang menjadi alternatif Pemerintah Orde Baru. Penggunaan *trawl* digantikan dengan penggunaan alat tangkap pukat cincin yang lebih ramah lingkungan karena pukat cincin merupakan alat tangkap yang memiliki selektivitas yang tinggi, tidak merusak habitat, serta tidak membahayakan nelayan kecil.<sup>34</sup>

Pada prakteknya penggunaan *purse seine* ternyata tidak lagi memberikan keuntungan para nelayan karena hasil tangkapannya semakin sedikit dan masa penangkapan ikan yang semakin panjang sekitar 2-3 bulan. Hal tersebut disebabkan karena *fishing ground* yang jauh dan jumlah trip per tahun saat ini cenderung semakin berkurang, tetapi *fishing day* semakin lama. Permasalahan baru tentang penggunaan alat tangkap muncul setelah kapal pukat cincin banyak yang beralih menggunakan cantrang dan bobot kapal dimanipulasi karena kemunculan cantrang merupakan alat tangkap modifikasi *trawl* lebih menguntungkan nelayan. Penggunaan *purse seine* sulit menemukan gerombolan ikan karena persaingan ketat sehingga banyak ditemukan memodifikasi kapal

---

<sup>32</sup>Widodo, *Ikan Layang...*, hlm. 195.

<sup>33</sup>Suryawati, "Dampak Ekonomi...", hlm. 46.

<sup>34</sup>Widodo, *Ikan Layang...*, hlm. 199.

pukat cincin menjadi kapal cantrang dengan biayanya yang tidak mahal. Pada saat perikanan pukat cincin dalam kondisi menurun, penggunaan jaring cantrang meningkat karena bagi nelayan Jawa Tengah lebih menguntungkan. Waktu melaut kapal cantrang paling lama sebulan dan keuntungan bersih lebih tinggi dibandingkan dengan kapal pukat cincin yang melaut selama tiga bulan. Keuntungan cantrang yang memuaskan nelayan berakibat pada jumlah penggunaan cantrang yang terus mengalami peningkatan. Cantrang yang mirip dengan *trawl* justru menimbulkan persoalan baru di kalangan nelayan. Berbagai konflik antarnelayan terjadi di beberapa daerah karena nelayan lebih senang mendapat hasil tangkapan ikan yang banyak dari pada memperhatikan kelestarian sumber daya ikan untuk jangka panjang.<sup>35</sup>

Penggunaan teknologi modern pada cantrang menyebabkan terjadinya konflik antara nelayan cantrang dengan nelayan kecil/tradisional sehingga terjadi kompetisi/persaingan penggunaan teknologi alat tangkap. Hal ini karena penangkapan dengan cantrang akan merugikan nelayan berskala kecil baik langsung maupun tidak langsung karena sumber daya perikanan tersapu bersih sebagai akibat alat tangkap tersebut kurang selektif.<sup>36</sup> Perebutan sumber daya perikanan timbul karena adanya kecemburuan sosial terhadap penggunaan alat tangkap. Terdapat kecenderungan yang besar bahwa pengoperasian alat tangkap yang canggih semakin memperderas atau keserakahan nelayan dalam mengeksploitasi sumber daya perikanan. Hal tersebut disebabkan karena individu atau kelompok masyarakat berupaya keras merealisasikan kepentingan mereka melalui eksploitasi sumber daya perikanan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Atmaja, "Distribusi Spasial...", hlm 235.

<sup>36</sup>Lukman Hakim dan Nurhasanah, "Cantrang: Masalah Dan Solusinya" (Seminar Nasional Riset Inovatif (Senari) Ke-4 Institut Pertanian Bogor, Bogor: 2016), hlm 220.

<sup>37</sup>Kusnadi, *Konflik Sosial...*, hlm. 110.

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis sumber yang didapat secara kritis pada peninggalan – peninggalan di masa lampau.<sup>38</sup> Metode sejarah mencakup empat langkah, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi dan penulisan (historiografi).<sup>39</sup>

Dalam Skripsi yang berjudul “Konflik Penggunaan Cantrang Masyarakat Nelayan di Kabupaten Rembang Tahun 1996 – 2015” ini, sumber – sumber yang digunakan berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, Laman Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, BPS Kabupaten Rembang, BPS Provinsi Jawa Tengah, TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kabupaten Rembang, Bappeda Kabupaten Rembang, Pelabuhan Perikanan Pantai Desa Tasik Agung, Arsip – Arsip koran Suara Merdeka, Jawa Pos dan Kompas, Majalah *online*, Jurnal-jurnal *online*, Skripsi, Tesis buku Perpustakaan Jurusan Sejarah maupun buku-buku Perpustakaan Universitas Diponegoro dan wawancara dengan beberapa pengurus kelompok nelayan cantrang Desa Tasik Agung, para pemilik kapal, ABK, buruh ikan dan kelompok nelayan Kabupaten Rembang.

Dalam penelitian sejarah tahap-tahap yang digunakan untuk meneliti adalah heuristik, kritik (eksternal dan internal), interpretasi dan historiografi.<sup>40</sup> Heuristik adalah upaya mencari dan menemukan sumber sejarah yang relevan dengan penelitian. Sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber-sumber primer merupakan sumber yang berasal dari pelaku utama yang melihat atau melakukan peristiwa. Sumber primer bisa meliputi dokumen, buku, artikel dan laporan-laporan yang relevan dengan kajian. Sumber wawancara dapat dikatakan

---

<sup>38</sup>Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), hlm. 32.

<sup>39</sup>Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah* (Jakarta: Mega Book Store, 1984), hlm. 22-23.

<sup>40</sup>Helius Sjamsuddin *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 67.

sumber primer tetapi harus disertai dengan beberapa sumber tertulis yang bisa dipertanggung jawabkan keakuratannya. Sedangkan sumber-sumber sekunder merupakan sumber yang tidak secara langsung didapat dari orang pertama yang melihat peristiwa sejarah.<sup>41</sup>

Sumber primer dari skripsi ini data diperoleh dari Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Sumber primer tersebut berupa *pertama*, Laporan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang diterbitkan setiap tahun dan juga sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja setiap tahunnya. Berdasar pada laporan tersebut dapat diketahui kondisi fluktuatif bidang perikanan setiap tahunnya. Dalam laporan tersebut juga berisi tentang berbagai alat tangkap dan kapal yang dioperasikan nelayan. Sumber tersebut memuat tahun 2006 hingga tahun 2015. DKP Rembang juga menyediakan data potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang yang digunakan penulis untuk memahami potensi perikanan terutama dalam bidang perikanan tangkap. Selain itu laporan tersebut juga berisi produksi perikanan laut, darat maupun produksi perikanan umum yang diterima setiap tahunnya. Laporan tahunan tersebut penting bagi skripsi ini karena dari laporan tersebut dapat dianalisis peningkatan jumlah penggunaan cantrang yang dioperasikan nelayan setiap tahunnya.

*Kedua*, adalah dokumen Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela dan Pukat tarik di Wilayah Perairan Indonesia. Peraturan Menteri ini penting dalam penulisan skripsi ini, karena dapat dijadikan sebagai dasar mengkaji sebab-sebab atau proses munculnya konflik penggunaan cantrang hingga penegakan hukum sebagai jalan untuk menangani konflik. Peraturan itu juga dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan penghapusan penggunaan cantrang secara tegas yang realisasinya dilakukan secara bertahap. *Ketiga*, data-data publikasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang dan BPS Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Rembang dalam angka tahun 1996-

---

<sup>41</sup>Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 35.

2015. Data publikasi tersebut berbentuk PDF yang digunakan penulis sebagai acuan untuk mengetahui kondisi geografis dan demografis dan kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Rembang. *Keempat*, adalah data yang diperoleh dari DKP Rembang berisi statistik perikanan tangkap Kabupaten Rembang. Statistik tersebut memuat diantaranya adalah data produksi dan nilai produksi perikanan Kabupaten Rembang dari berbagai alat tangkap termasuk cantrang. Data tersebut di klasifikasikan berdasarkan pada jenis ikan dan dianggap penting karena digunakan untuk menganalisa apakah produksi perikanan cantrang mengalami peningkatan, fluktuasi atau mengalami penurunan.

Selain menggunakan sumber primer tertulis, skripsi ini juga memanfaatkan sumber primer lisan berupa wawancara dengan tokoh atau pelaku sejarah. Wawancara tersebut dilakukan dengan beberapa narasumber yang terlibat dalam penanganan kenelayan yaitu, Bapak Sunyoto, beliau menjabat di bidang seksi pengelolaan penangkapan ikan DKP Rembang. Beliau paham dengan masalah yang dihadapi nelayan terutama masalah yang berkaitan dengan cantrang dari tahun ke tahun. Kedua adalah Bapak Djumadi selaku pegawai DKP Rembang di bidang sarana dan prasarana, beliau yang memberikan informasi mengenai pembangunan-pembangunan di wilayah pelabuhan dan TPI. Ketiga adalah Bapak Pamudji selaku Kepala Bidang P2SDKP DKP Rembang. Beliau memberikan informasi mengenai penggunaan alat tangkap di Kabupaten Rembang dari alat tangkap yang ramah lingkungan hingga alat tangkap yang dianggap merusak. Masih banyak lagi sumber lisan yang didapatkan penulis diantaranya wawancara dengan para pemilik kapal, juragan kapal, buruh muat bongkar dan ABK kapal yang tidak bisa dijelaskan satu persatu. Semakin banyak informasi yang didapatkan semakin banyak pula fakta yang didapat untuk penulisan sejarah. Hasil wawancara beberapa tokoh yang representatif diseleksi dan dibandingkan, sehingga akan diperoleh data yang objektif.

Selain sumber primer, skripsi ini juga menggunakan sumber sekunder sebagai sumber pendukungnya, gunanya untuk memperkuat sumber primer tertulis dan lisan. Sumber sekunder didapat dari Perpustakaan Daerah Jawa Tengah Semarang, beberapa jurnal *online*, Perpustakaan Universitas Diponegoro

dan Perpustakaan Sejarah Universitas Diponegoro untuk menemukan hasil penelitian yang terkait dengan penggunaan alat penangkap ikan. Sumber sekunder lainnya adalah artikel-artikel yang dimuat dalam majalah dan surat kabar sezaman atau bentuk penerbitan yang lain. Sumber-sumber itu juga berguna untuk melengkapi sumber-sumber primer dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peristiwa yang diteliti.

Setelah pencarian sumber tahap kedua adalah kritik sumber, baik eksternal maupun internal. Kritik sumber salah satu yang harus diperhatikan adalah autensitas dan kredibilitas sumber. Peneliti harus mampu mengungkapkan bahwa dokumen ataupun sumber harus asli dan dapat dipercaya, yaitu dengan membandingkan sumber satu dengan sumber lainnya.<sup>42</sup>

Tahap ketiga adalah kegiatan interpretasi atau penafsiran terhadap sumber yang sudah didapat untuk menemukan fakta-fakta yang diperoleh dari proses kritik sumber. Interpretasi sering disebut sebagai subjektivitas.<sup>43</sup> Fakta-fakta sejarah yang relevan disintesis melalui imajinasi, interpretasi, dan teorisasi untuk mencari hubungan antara satu fakta dan fakta lain dalam kerangka hubungan kronologis dan kausalitas. Dengan demikian, kajian mengenai perkembangan dan konflik penggunaan cantrang dapat dieksplanasikan dan selanjutnya dapat dipahami secara bulat dan utuh. Dalam tahap ini penggunaan konsep-konsep dan teori-teori ilmu sosial berguna untuk membantu menjelaskan hubungan antarfakta, yaitu hubungan antara perkembangan penggunaan cantrang yang termasuk alat tangkap yang merusak dan konflik yang ditimbulkan dari akibat perkembangannya tersebut.

Tahap keempat adalah penulisan sejarah atau historiografi. Historiografi merupakan kegiatan merekonstruksi peristiwa yang terjadi di masa lalu.<sup>44</sup> Dalam tahap ini fakta-fakta yang disintesis dipaparkan dalam bentuk penulisan

---

<sup>42</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm.77.

<sup>43</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm. 78.

<sup>44</sup>Sartono Kartodirjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 1982), hlm. 4.

sejarah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca.

### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disajikan dalam lima bab sebagai berikut. Bab pertama merupakan sebuah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua dalam skripsi ini membahas mengenai gambaran umum Kabupaten Rembang tahun 1996-2015 diantaranya kondisi geografi dan demografi, kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial budaya dan potensi perikanan tangkap.

Bab ketiga membahas mengenai perkembangan penggunaan cantrang di Kabupaten Rembang tahun 1996-2015. Subbab pertama meliputi perkembangan penggunaan armada dan alat penangkap ikan, kedua faktor pendorong penggunaan cantrang, dan ketiga adalah perkembangan penggunaan cantrang di Kabupaten Rembang tahun 1996-2015.

Bab keempat membahas mengenai konflik dalam penggunaan cantrang pada masyarakat nelayan di Kabupaten Rembang tahun 1996-2015. Subbab pertama meliputi konflik antar nelayan terdiri dari insiden tahun 1996 dan 2009, kedua adalah penegakan hukum terhadap larangan penggunaan cantrang tahun 2005 meliputi izin kapal cantrang dipersulit dan razia dan pungutan liar, ketiga adalah larangan penggunaan kapal cantrang tahun 2015 yaitu upaya pemerintah dalam pelarangan penggunaan cantrang dan upaya nelayan dalam penolakan larangan penggunaan cantrang dan toleransi penggunaan cantrang 30 GT.

Bagian akhir atau bab kelima merupakan simpulan atas keseluruhan pembahasan penelitian ini. Kesimpulan diharapkan dapat memberikan solusi dan pemecahan permasalahan yang akan di bahas agar skripsi dapat menjadi suatu kajian yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan.